



**RILIS**

**KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI II DPR RI  
TERKAIT EVALUASI SELEKSI PENERIMAAN CPNS DAN PPPK TAHUN 2023  
PADA MASA PERSIDANGAN IV TAHUN SIDANG 2023 - 2024  
KE KANREG II BKN SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR  
TANGGAL 6 – 8 MARET 2024**

---

Komisi II DPR RI melaksanakan kegiatan kunjungan kerja spesifik ke Kantor Regional II Surabaya Jawa Timur pada tanggal 6 Maret 2024 dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terkait evaluasi seleksi penerimaan CASN (CPNS dan PPPK) Tahun 2023. Kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI dipimpin oleh Dr. Junimart Girsang, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., Ketua Tim/Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan. Kunjungan kerja spesifik hari ini diikuti juga oleh beberapa Anggota Komisi II DPR RI dari berbagai fraksi, dan didampingi pula oleh pejabat dari BKN RI, yaitu Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian, Bapak Dr. Otok Kuswandar, S.Sos., CIPA.

Tahapan seleksi penerimaan CPNS dan PPPK tahun 2023 telah dimulai sejak September 2023 yang lalu, tahapan seleksi kompetensi dan pengumuman hasil kelulusan PPPK tahun 2023 sudah selesai dilaksanakan. Pada tahun 2023 pemerintah menetapkan 567.166 formasi yang diperuntukkan bagi 71 instansi pemerintah yang terdiri dari instansi pusat sebanyak 77.161 formasi, dan instansi daerah sebanyak 490.005 formasi.

Alokasi formasi pada seleksi CPNS dan PPPK tahun 2023 sebanyak 80% diperuntukkan bagi PPPK dan 20% diperuntukkan bagi pelamar umum (fresh graduate). Pegawai PPPK menjadi prioritas kebutuhan seleksi calon ASN tahun 2023 dengan alokasi sebesar 538.332 formasi dari total 567.166 formasi.

Jumlah peserta yang lulus seleksi PPPK tahun 2023 sebanyak 412.712 orang dari 538.332 alokasi formasi PPPK yang tersedia. Terdapat 125.620 formasi yang belum terisi akibat belum optimalnya usulan formasi yang disampaikan oleh pemerintah daerah. Saat ini peserta yang telah lulus seleksi PPPK tahun 2023 sedang menyelesaikan proses pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) dan penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP).

Terhadap penerimaan CASN, Komisi II DPR RI mencatat beberap hal yang perlu dievaluasi, di antaranya:

1. Kesesuaian antara kebutuhan formasi dengan jumlah formasi yang telah ditetapkan pemerintah.
2. Adanya praktik perjokian dalam pelaksanaan SKD CPNS.
3. Kebijakan pemerintah daerah terhadap peserta yang lulus PPPK tahun 2023 yang mengajukan relokasi penempatan (pindah lokasi kerja) agar sesuai dengan domisili.
4. Progress pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) dan penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) PPPK bagi peserta yang telah lulus seleksi PPPK tahun 2023.

Oleh karena itu, Komisi II DPR RI ingin mendalami secara langsung terkait penerimaan CASN tahun 2023 di Provinsi Jawa Timur.

Pada saat pemaparan, Kepala Kantor Regional II BKN Surabaya, Bapak Mohammad Ridwan, S.T., M.Eng., mengungkapkan bahwa formasi yang ditetapkan sejauh ini sesuai dengan kebutuhan ASN di setiap instansi di Provinsi Jawa Timur. Adapun total formasi PPPK 2023 di Jawa Timur sebanyak 43.479. Peserta lolos seleksi sebanyak 36.759 (84,54%), dan formasi tidak terisi sebanyak 6.694 (15,46%).

Untuk mengantisipasi adanya kecurangan, perjokian atau kejahatan cyber dalam pelaksanaan test seleksi, Kanreg II BKN Surabaya melakukan beberapa langkah:

1. melakukan verifikasi peserta saat registrasi (pencocokan kartu identitas, kartu peserta, dan peserta).
2. penggunaan face recognition pada aplikasi CAT.
3. penggunaan operation system khusus, yaitu CAT-OS (Aplikasi CAT hanya dapat dibuka melali CAT-OS).

Pada penerimaan CASN tahun 2023 di Surabaya terjadi kasus bahwa peserta yang diduga melakukan perjokian SKD PNS Kemenkumhan tapi akhirnya ditangkap di Politeknik Pelayanan Surabaya. Yang bersangkutan dijanjikan uang sebesar Rp25-30 juta dan terstruktur sampai ke atasan. Perjokian itu diketahui karena tidak lolos pada saat face recognition.

Mengenai penempatan ASN, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, penempatan PPPK sesuai dengan kebutuhan masing-masing instansi. Untuk guru, lokasi penempatan menjadi kewenangan instansi: Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten/Provinsi.

Kemudian mengenai progres penetapan NI PPPK CASN 2023 di wilayah kerja Kanreg II Surabaya, untuk formasi guru baru mencapai 29%, formasi Nakes mencapai 48%, dan formasi teknis baru mencapai 56%. Masalah ini perlu dicarikan

jalan keluar agar proses verifikasi bisa lebih cepat sehingga peserta yang sudah dinyatakan lulus segera mendapatkan Nomor Induk.

Untuk penerimaan CASN tahun 2024 sedang dilakukan proses pembahasan oleh unit kerja di masing-masing instansi. Untuk penerimaan CASN 2024, Kanreg II BKN Surabaya memberikan masukan, di antaranya:

1. Pengadaan CASN tidak dilaksanakan serentak dalam waktu yang sama karena masa pensiun ASN di masing-masing kabupaten berbeda-beda. Diusulkan agar seleksi CASN dapat diselenggarakan 4-5 kali dalam setahun secara bertahap.
2. Penjadwalan seleksi diharapkan agar lebih sistematis.
3. Lokasi tes terpusat di Kantor Regional BKN karena sarana dan prasarana telah memenuhi standar.

Komisi II DPR RI memberikan apresiasi atas kinerja Kanreg II BKN selama ini sekaligus memberikan catatan penting, yaitu:

1. Proses penetapan NI PPPK bagi yang sudah dinyatakan lulus pada penerimaan 2023 perlu dilakukan langkah-langkah percepatan.
2. Titik lemah pada penerimaan CASN tahun 2024 perlu segera dikaji dan dicarikan jalan keluar yang tepat agar tidak terulang lagi.
3. Terhadap usulan agar penerimaan CASN tahun 2024 tidak dilakukan serentak, maka BKN perlu melakukan kajian lebih mendalam, jangan sampai menimbulkan persoalan baru.

Kota Surabaya, 6 Maret 2024,

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Kantor Regional II BKN Surabaya Provinsi Jawa Timur.